

Implementasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia Antara Harapan dan Realita

Khairul Saleh¹, Muhsim², Nurul Hidayati Murtafiah³

¹Institut Agama Islam An Nur Lampung

¹khairulsaleh.hasnawi@gmail.com, ²muhsim1208@gmail.com, ³nurul752.nhm@gmail.com

ABSTRACT	Article Info
<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan multikultural di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah di lingkungan sosial dengan melakukan percakapan ekstensif antara peneliti dan subjeknya. Peneliti adalah subjek penelitian, namun target penelitian ini adalah implementasi pendidikan multikultural yang ada dan yang akan datang. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data semuanya tergabung dalam pendekatan analisis interaktif yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Pada akhirnya ditemukan bahwa penyelenggaraan pendidikan multikultural yang banyak mengalami penyimpangan meliputi dimensi konsep multidimensi serta dimensi makna dan isi serta dimensi budaya dan primordialis serta dimensi egosentrisme dan religiositas serta pendidikan multikultural diprediksi akan tumbuh baik secara kuantitas maupun kualitas di masa mendatang. Sebaliknya, masyarakat Indonesia harus sadar betul bahwa pluralisme adalah investasi yang sangat berharga. Orang Indonesia mungkin hidup, inventif, dan inovatif karena keragaman budaya. Akibatnya, anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam, identitas gender, orientasi seksual, dan asal etnis, ras, dan budaya harus diajarkan sejak usia dini bahwa pendidikan multikultural dapat memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi semua siswa. Itu juga didasarkan pada gagasan bahwa murid tidak belajar dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh cara mereka dibesarkan dalam budaya mereka sendiri. Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa implementasi pendidikan multikultural di dunia modern menghadapi masalah yang kompleks. Alhasil, peneliti berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pendidikan multikultural di masa depan harus mampu meminimalisir berbagai bentuk permasalahan yang muncul saat ini.</p>	<p>Article history Received: 15 Agustus 2022 Revised: 21 Agustus 2021 Accepted: 09 September 2022</p> <p>Keywords Keyword_Multikultural, pluralisme Keyword_Analisis interaktif.</p>

PENDAHULUAN

Perbincangan tentang pendidikan antarbudaya di Indonesia telah berlangsung cukup lama (Baedhowi, 2016), kuliah sari Analisis Kebijakan Pendidikan, program doktor IP, UNS).

Tidak dapat disangkal bahwa dasar-dasar pendidikan multikultural di Indonesia sudah mapan sejak awal ketika negara ini masih dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Pada masa inilah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan mengadakan sidang pertamanya antara tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 guna membahas persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia saat itu. Dalam sidang tersebut, terjadi perdebatan sengit antara golongan nasionalis dan golongan agama mengenai rumusan sila pertama Pancasila yang ditulis oleh panitia kecil Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 22 Juni 1945. Argumentasi itu terkait dengan rumusan sila pertama Pancasila.

Organisasi keagamaan menekankan bahwa prinsip utama harus sebagai berikut: Ketuhanan Yang Maha Esa, bersama-sama dengan kebutuhan untuk menegakkan Hukum Islam (Syariah) bagi umat Islam. Usulan tersebut ditolak oleh kaum nasionalis karena penduduk Indonesia terdiri dari banyak golongan selain umat Islam. Kaum nasionalis beralasan bahwa penjabaran sila pertama harus dapat diterima oleh semua agama di Indonesia; oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa itu seharusnya Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penerimaan awal gagasan tercapainya persatuan bangsa muncul sebagai hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh berbagai ormas keagamaan. Toleransi merupakan komponen fundamental dari pendidikan multikultural, karena merupakan kunci untuk mewujudkan tujuan persatuan bangsa.

Minimnya prasangka dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak bangsa merupakan komponen kritis dari pendidikan multikultural. Untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan, perlu untuk

memasukkan pendidikan multikultural.

Pentingnya pendidikan multikultural dalam menumbuhkan rasa identitas nasional di Indonesia tidak dapat dilebih-lebihkan. Untuk menghadapi disintegrasi masyarakat, negara, dan negara, perlu diwaspadai keragaman dan upaya untuk melindungi, melestarikan, dan mewujudkannya dalam bidang-bidang ini. Sebagai salah satu sumber konflik yang dapat membahayakan kedaulatan Indonesia, sikap egois harus diberantas di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Akibatnya, sejumlah pertanyaan penelitian perlu ditelaah secara mendalam, pertanyaannya adalah: Bagaimana implementasi pendidikan multikultural di Indonesia saat ini, dan bagaimana implementasinya di masa depan?.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan untuk mengetahui berdasarkan tradisi metodologis yang beragam dari penyelidikan yang menyelidiki masalah sosial atau manusia." (Creedwell, 2010: 8). Gambaran yang kompleks dan komprehensif dibangun oleh peneliti dan informasi yang luas disajikan dalam laporan. Seperti yang dikatakan Moleong, "Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks proses interaksi sosial yang alami, dengan komunikasi mendalam antara peneliti dan fenomena yang diselidiki" (Herdiansyah, 2010: 9) Cara lain untuk menggambarkannya adalah bahwa itu adalah penyelidikan dan penyelidikan kualitas atau aspek pengaruh sosial yang tidak dapat diungkapkan secara

kuantitatif (Saryono, 2010: 1). Juga pada tahun 2011, metode penelitian penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi postpositivisme dan digunakan untuk mengkaji kondisi alam (sebagai lawan eksperimen), dimana pengambilan sampel sumber data dilakukan secara sengaja dan acak. teknik pengumpulan triangulasi (gabungan), dan hasil analisis data menekankan pentingnya analisis data induktif/kualitatif. (Sugiyono, 2011:15)

Menguraikan teori-teori, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap kondisi objek alami menggunakan metode yang didasarkan pada filosofi post- positivisme dan memanfaatkan komunikasi mendalam yang canggih antara seorang peneliti dan fenomena yang diteliti untuk lebih memahami suatu fenomena.

Implementasi Pendidikan Multikultural saat ini dan yang akan datang dipelajari sebagai subjek, sedangkan peneliti sendiri sebagai objek penelitian. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan dalam proses pengumpulan data. Dengan menggunakan metode analitik interaktif Miles dan Huberman (1984:23), dilakukan empat tahap untuk mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, dan menyimpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para ahli pendidikan multikultural memiliki pendapat yang berbeda tentang masa depan pendidikan antarbudaya di Indonesia, sehingga tidak mungkin untuk membuat prediksi yang pasti tentang hal itu. Ada banyak perspektif berbeda tentang cara terbaik untuk mendidik siswa dari berbagai latar belakang. Bagi Azyumardi Azra (2005), topik keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia menjadikan pendidikan multikultural

menjadi perdebatan lintas batas. Pendidikan keragaman budaya merupakan reaksi terhadap perubahan demografi dan budaya dalam komunitas lokal atau bahkan global. Berbicara tentang pendidikan multikultural, menurut Prudence Crandall, berarti mengajarkan kepada siswa tentang budaya dan latar belakang orang lain selain suku (budaya) mereka sendiri.

Pada akhirnya, ini adalah pelajaran dalam pendidikan keragaman budaya, seperti yang dicatat Andersen dan Custer (1994). Namun, Musa Asy'ari berpendapat bahwa pendidikan multikultural adalah kemampuan untuk belajar tentang cara hidup yang menghormati, jujur, dan toleran terhadap berbagai budaya yang membentuk dunia kita. Ada beberapa kebijakan budaya yang mendorong penerimaan pluralitas agama dan multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan multikulturalisme adalah salah satunya. Ini juga dapat dilihat sebagai cara berpikir tentang dunia yang memanifestasikan dirinya dalam ideologi politik.

Demikian pula masyarakat multikultural, menurut Parekh (1999), adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa jenis budaya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, seperti pandangan dunia yang berbeda, sistem makna, nilai, struktur organisasi, dan sejarah. Menurut Parekh (1997), multikulturalisme terdiri dari tiga prinsip utama. Untuk memulai, ada masalah bagaimana berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Ada juga referensi tentang keragaman saat ini di tempat kerja. Ada juga hubungan antara variasi dan reaksi atau perilaku tertentu. Sebagai ideologi normatif, akhiran isme menandakan bahwa ia seharusnya bekerja pada setiap individu dalam masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda.

Kebijakan pendidikan sangat penting dalam menerapkan multikulturalisme sebagai teori normatif di tanah air. "Multikulturalisme meliputi pengetahuan, kekaguman, dan penilaian budaya seseorang, serta rasa

hormat dan minat tentang budaya etnis orang lain,” kata Lawrence Blum (2001).

- (a) Penghargaan atas kenyataan bahwa ada banyak budaya yang berbeda dalam masyarakat kita,
- (b) Pengakuan martabat manusia dan hak asasi manusia,
- (c) Pembangunan dan tanggung jawab bagi masyarakat internasional.

Tugas manusia yang berhubungan dengan bumi telah berkembang sepanjang waktu. Ada enam tujuan yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar tersebut, antara lain: Pertama, untuk menetapkan sudut pandang historis yang berbeda dari kelompok masyarakat (ethnohistorisitas). Kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kegiatan budaya. Ketiga, meningkatkan daya saing antarbudaya antara banyak budaya yang berada di lingkungan yang sama. Untuk menghilangkan rasisme, seksisme dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Langkah kelima adalah menumbuhkan rasa terhubung dengan alam. Keenam, penting untuk belajar bagaimana terlibat dalam aksi sosial.

Terkait dengan topik pendidikan multikultural, H.A.R Tilaar menyoroti bahwa fokus tidak lagi hanya pada pengelompokan etnis, domain agama dan budaya, atau mainstream dalam program pendidikan multikultural. Penekanan pada pendidikan multikultural yang berfokus pada integrasi orang-orang dari kelompok minoritas ke dalam masyarakat arus utama akan menjadi sumber tekanan utama dalam masalah ini.

Pendidikan multikultural pada hakikatnya adalah semacam kepedulian dan pemahaman terhadap pengakuan politik kelompok minoritas. Pendidikan multikultural bertujuan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Rasisme dan non-rekognisi tidak hanya didasarkan pada ketidakseimbangan rasial, sehingga paradigma pendidikan multikultural memasukkan isu-isu ketidakadilan,

kemiskinan, ketertindasan dan keterbelakangan kelompok minoritas di berbagai daerah, masyarakat, budaya dan ekonomi.

Untuk mendukung pertumbuhan studi etnis, paradigma ini akan mengarah pada inklusi studi etnis di pendidikan dasar dan menengah. Tujuan mendasar dari topik ini adalah untuk memberikan kontrol yang lebih besar kepada minoritas dan komunitas yang kurang beruntung atas nasib mereka sendiri. Epistemologi aksiologi dan ontologi tiga dimensi adalah penjelasan di balik ini. Ada dua cabang utama metafisika: ontologi (studi tentang realitas tertinggi) dan epistemologi (studi tentang pengetahuan dan sumber daya). Aksiologi Filsafat: kajian tentang nilai, kehormatan, dan perilaku manusia (Kamus Alam Populer, Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry). Menurut Muhaiemin El-Ma'hady (2004), situasi yang merugikan adalah situasi yang mengakibatkan kerugian. Diskriminasi dapat dilihat dalam kelompok-kelompok dengan ciri-ciri yang berbeda, seperti kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan bagi pendidikan multikultural di Indonesia. Landasan hukum lainnya adalah UU No. 20 Tahun 2013 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, serta kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan gratis, yang melarang diskriminasi dan bentuk perlakuan lainnya. Terjadi perubahan Pasal 31 Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) setiap warga negara berhak atas pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah harus membiayainya; (3) pemerintah menyelenggarakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka kehidupan

berbangsa yang diatur dengan undang-undang; (4) negara menyediakan dana untuk pendidikan dasar bagi semua warga negara; dan (5) negara harus mendirikan dan memelihara

Pengertian pemerataan, satuan pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan contoh lain dari paradigma baru yang telah diperkenalkan sebagai akibat dari Undang-Undang Pendidikan yang baru. Tidak kalah pentingnya adalah kesetaraan antara lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan yang dipimpin oleh Kementerian Agama, yang masing-masing memiliki kualitas tertentu. Meski demikian, nama pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (seperti madrasah dan lembaga pendidikan lainnya) juga dicantumkan di semua jenjang pendidikan. Akibatnya, UU Pendidikan telah menjadikan sistem pendidikan secara lebih utuh (pasal 4 ayat 2).

Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk mendorong siswa untuk mengadopsi perspektif yang simpati, hormat, kekaguman, dan pemahaman bagi pengikut banyak agama dan tradisi budaya. Menurut Imron Mashadi (2009), tujuan pendidikan multikultural adalah untuk membangun masyarakat yang kuat, maju, adil, makmur, dan bebas dari prasangka apa pun berdasarkan suku, ras, agama, dan budaya. Dengan hasrat yang membara untuk meningkatkan kekuatan kita secara menyeluruh sehingga kita dapat mencapai kekayaan nasional, harga diri yang tinggi, dan rasa hormat dari negara lain, kita termotivasi untuk: Menurut Sutarno (2008: 1-24), Tujuan pendidikan antarbudaya mencakup total delapan aspek yang berbeda, yaitu sebagai berikut: Literasi di banyak etnis dan budaya sedang dikembangkan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh informasi dan kesadaran tentang banyak budaya yang dipraktikkan oleh semua kelompok etnis. Pengembangan diri. Memudahkan siswa

untuk memahami bahwa budaya dari semua kelompok etnis memiliki nilai yang sama relatif satu sama lain memberi mereka lebih banyak kepercayaan diri saat terlibat dengan anggota kelompok etnis lain yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Elaborasi keyakinan inti dan cita-cita. Melalui pendidikan, peserta didik mampu memperoleh cita-cita dasar harkat dan martabat bagi semua orang, keadilan, persamaan, dan gagasan demokrasi. Agar siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mengapa nilai-nilai yang beragam tidak dapat dihindari untuk berbenturan dalam masyarakat yang pluralistik, pendidikan antarbudaya harus dilaksanakan. Kesetaraan untuk memperluas jangkauan kemungkinan pendidikan yang tersedia bagi siswa dari berbagai latar belakang ras, etnis, sosial ekonomi, dan budaya. Ini dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan peran seefektif mungkin dalam masyarakat demokratis-pluralistik. Ini adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sama yang diperlukan bagi warga dari kelompok yang berbeda untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan berkomunikasi satu sama lain untuk menciptakan masyarakat yang bermoral. Clive Black mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai tujuan dari praktik pendidikan multikultural: (a) Meningkatkan kesadaran Studi Etnis, yang berfokus pada latar belakang budaya siswa sendiri dan mencakup kelas bahasa warisan; (b) Mendidik semua siswa tentang berbagai budaya tradisional lainnya, yang mungkin bersifat nasional atau mendunia. Studi semacam ini dapat dilakukan dalam sejumlah metode yang berbeda; namun, pertama-tama perlu untuk mengorganisir penyelidikan yang komprehensif terhadap masalah inti yang dihadapi budaya suatu bangsa dan susunan etnis. (c) Menumbuhkan penerimaan yang tulus dan perlakuan yang adil terhadap sub-budaya etnis yang diasosiasikan dengan perbedaan

agama, ras, latar belakang bangsa, dan lain-lain, baik dalam tatanan nasional maupun internasional (d) Memberikan pemahaman tentang persamaan perbedaan agama, ras, kebangsaan latar belakang, dan sebagainya (e) Membantu siswa dalam bekerja menuju bentuk budaya yang lebih memadai, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat (f) Mempromosikan penerimaan keragaman etnis di masyarakat Dalam artikel "A Basic Philosophy of Multicultural Education and its Application to the Classroom" dan "Multicultural Education: A Teacher's Guide to Content and Process," David Westmeier dan Hilda Hernandez menyebutkan bahwa Sleeter and Grant (1988), dua orang pendidik di lapangan pendidikan multikultural, mengusulkan bahwa ada lima pendekatan yang berbeda untuk pendidikan multikultural. "dalam mendefinisikan dan melaksanakan pendidikan multikultural, ada aliran, sudut pandang, atau pemahaman yang berbeda, dan implementasinya adalah apa yang dipahami", inilah yang dimaksud dengan pendekatan pendidikan multikultural, dan implementasi adalah apa yang dipahami.

"Mengajarkan perbedaan budaya" adalah strategi pertama yang disarankan Sleeter dan Grant lakukan dalam situasi ini. Ini mengacu pada proses menginstruksikan siswa tentang budaya tertentu yang berbeda dari budaya sendiri. Dalam contoh khusus ini, tujuan pendidikan multikultural adalah untuk mendidik anggota kelompok minoritas, yang merupakan persentase yang relatif kecil dari populasi umum dan mempertahankan budaya yang berbeda dari mayoritas. Tujuannya adalah untuk membiasakan anggota minoritas dengan budaya mayoritas, sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan (pengetahuan, nilai, dan keterampilan lainnya). Menurut teori ini, tujuan utama pendidikan multikultural adalah untuk memfasilitasi adaptasi budaya minoritas dengan budaya mayoritas, sehingga semua anggota masyarakat dapat hidup

berdampingan secara damai.

Metode "hubungan manusia" adalah strategi kedua. Mereka yang hidup dalam komunitas atau lingkungan sosial yang memiliki sejumlah besar hubungan sosial antara orang-orang yang berbeda budaya menjadi fokus pendidikan multikultural yang mengambil pendekatan ini. Dengan kata lain, mereka yang hidup dalam komunitas atau lingkungan sosial yang memiliki jumlah hubungan sosial yang signifikan antara orang-orang yang berbeda etnis dan budaya adalah target audiens untuk pendidikan multikultural. Menurut pandangan ini, pendidikan multikultural adalah sesuatu yang harus dilakukan di wilayah metropolitan dan kota-kota besar karena tempat-tempat ini adalah rumah bagi orang-orang dari berbagai latar belakang ras dan budaya yang berinteraksi satu sama lain secara teratur. Hubungan antar suku yang berbeda berpotensi menimbulkan berbagai perselisihan budaya. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah untuk mengurangi jumlah masalah sosial yang disebabkan oleh adanya perbedaan ras, budaya, dan asal-usul etnis. Sebaliknya, Sleeter dan Grant tidak mengidentifikasi substansi atau bentuk pendidikan multikultural saat menggunakan teknik ini; Namun, seharusnya dikaitkan dengan studi budaya untuk mencapai saling pengakuan, saling pengertian, dan saling menghormati. Strategi ketiga yang dimaksud di sini adalah "studi etnis". Di dunia nyata, ada kumpulan pengetahuan atau seperangkat disiplin ilmu yang disebut sebagai "studi etnis dan budaya Cina-Amerika," "studi etnis dan budaya Afro-Amerika," dan seterusnya. Siapapun yang memiliki ketertarikan pada budaya tertentu dimaksudkan untuk menjadi target audiens, dan tujuannya adalah untuk menyajikan budaya unik tertentu. Salah satu kelemahan menggunakan strategi ini adalah mendorong siswa untuk fokus mempelajari budaya mereka sendiri daripada peradaban lain. Namun, dalam bentuknya yang paling dasar, ia menawarkan pengenalan banyak

budaya kepada siapa saja yang tertarik melakukannya untuk mencapai saling pengertian, pengakuan timbal balik, dan saling menghormati.

"Pendekatan pendidikan multikultural" merupakan metodologi keempat. Semua orang di kelas berada di garis bidik. Saat menggunakan metodologi ini, setiap siswa, tanpa kecuali, akan belajar tentang koleksi peradaban yang beragam (kadang-kadang disebut "multikultur"). Oleh karena itu, materi pelajaran pendidikan multikultural yang sering disebut dengan "pendekatan pendidikan multikultural" bersifat multikultural. Tujuan strategi ini adalah untuk mempromosikan hak asasi manusia (gagasan bahwa semua individu diberkahi dengan hak-hak tertentu berdasarkan status mereka sebagai manusia yang harus diperlakukan dengan kesopanan), menghargai perbedaan (gagasan bahwa perbedaan ras, etnis, dan budaya perlu tidak menyebabkan sebagian individu memandang dirinya lebih unggul dari yang lain), dan responsif serta mau terlibat dalam menyelesaikan masalah ketimpangan (kesetaraan kemanusiaan meskipun berbeda ras, warna kulit, dan budaya).

Perspektif multikultural dan rekonstruksi sosial merupakan strategi kelima dan terakhir. Menyusun ulang, menyusun ulang, atau membangun kembali semua sinonim untuk istilah "rekonstruksi." Westmeier, menulis dalam Tatang M. Amyrin, mengatakan bahwa metode ini adalah yang paling dapat diterima dan tepat untuk tujuan menjelaskan apa sebenarnya pendidikan multikultural karena beberapa alasan. Untuk memulai, karena nama pendidikan multikultural sosial lebih pas dan sesuai dengan sebutan pendidikan multikultural. Untuk memenuhi persyaratan kurikulum secara utuh, "pendidikan multikultural" sebagai sebutan harus menampilkan "pendidikan multikultural" dalam bentuk idealnya (bidang kajian). Tidak lagi "pendidikan multikultural" dianggap hanya sebagai subbidang dari "ilmu sosial". Oleh karena itu, mata pelajaran bahasa, seni,

matematika, dan sains, serta yang lainnya, harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan (di sekolah dan lembaga pendidikan formal lainnya) yang mengandung muatan multikultural. Kedua, menurut Westmeier, istilah "pendidikan yang merekonstruksi tatanan sosial" mencerminkan tujuan utama dari pendekatan kelima, yang sebenarnya mencakup tujuan pendekatan keempat, yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. hak asasi manusia, menghargai keragaman dan perbedaan, isu kesetaraan, dan sebagainya. Tujuan dari pendekatan keempat ini terkait dengan pengajaran dan pembelajaran hak asasi manusia, menghormati keragaman dan perbedaan, masalah kesetaraan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tujuan akhirnya adalah agar para murid (siswa) memahami beragam masalah multikultural (keragaman budaya), tanggap terhadap suatu tugas, dan siap untuk mengambil tindakan sehubungan dengan masalah ini. Isu-isu tersebut terjadi di dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat di suatu negara.

Di Indonesia terdapat banyak sekali keragaman budaya, suku, bahasa, dan agama. Oleh karena itu, diperlukan gerakan nasional yang menggunakan taktik dan instrumen strategis untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung negara yang berdaulat dan bermartabat. Pendidikan multikultural adalah salah satu alat yang kita miliki.

Diperlukan rencana dan pendekatan yang metodis untuk menciptakan negara dengan penduduk yang beragam yang tersebar di wilayah yang luas. Sebagai bahan pertimbangan topik pendidikan di Indonesia, perlu dikembangkan model pendidikan multikultural, yaitu model pendidikan yang dapat mengakomodasi berbagai keragaman secara harmonis, toleransi dan saling menghormati. Diharapkan dapat menjadi tonggak kemakmuran, kebahagiaan, dan kerukunan masyarakat Indonesia. Pendidikan dalam konteks cultural studies membutuhkan

pendidikan multikultural, yang menganggap proses pendidikan sebagai proses akulturasi. Dari kenyataan bahwa manusia itu beraneka ragam muncullah konsep multikulturalisme. Etnisitas pengalaman hidup seseorang tercermin dalam kesadaran dan nilai-nilai mereka. Konflik muncul sebagai akibat dari fanatisme daripada persatuan, meskipun keragaman budaya yang kaya. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap proses pembelajaran di arena pendidikan.

Keragaman suku dan budaya dalam proses pembelajaran diharapkan dapat diakomodasi melalui pendidikan multikultural. Siswa dihadapkan pada berbagai ide melalui pendidikan multikultural. Gagasan-gagasan ini mencakup konsep kehidupan yang sukses, sistem kepercayaan, semangat peradaban lain, dan kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif lain. Ada kemampuan yang lebih halus yang dikembangkan melalui moral dan karakter, keterbukaan terhadap melihat diri sendiri melalui mata orang lain, dan kesiapan untuk mendengarkan dengan empati dan kepekaan untuk lebih memahami orang lain. Pendidikan multikultural harus mampu menanamkan rasa memiliki pada anak-anak terhadap kelompok etnis dan budaya lain, serta komunitas manusia yang lebih besar. Sistem pendidikan multikultural juga dapat membantu siswa untuk lebih memahami budaya mereka sendiri, serta budaya masyarakat yang lebih besar. Ini akan membantu mereka untuk menavigasi komunitas dengan lebih baik dan menemukan tempat mereka di dalamnya (Parekh dalam Ruminati, 2011: 7)

Pada kenyataannya, permasalahan pendidikan multikultural di Indonesia cukup unik dibandingkan dengan permasalahan di negara lain. Mereka menekankan perlunya pendidikan multikultural dalam menyikapi isu-isu sosial dan isu-isu yang terkait dengan pendidikan berbasis budaya. Pendidikan multikultural. Pendidikan antarbudaya di

Indonesia dapat mengambil manfaat dari pemanfaatannya. Penyebab-penyebab berikut ini yang menyebabkan sulitnya pendidikan multikultural Indonesia saat ini:

a. Keanekaragaman identitas budaya daerah

Keanekaragaman merupakan keuntungan sekaligus sumber potensial konflik dalam situasi tertentu. Memang, keragaman budaya daerah berkontribusi pada pengayaan budaya secara keseluruhan dan merupakan faktor penting dalam pembangunan negara multikultural. Namun, ada juga kemungkinan bahwa itu mungkin berantakan, menjadikannya tempat berkembang biak yang ideal untuk ketidakpercayaan dan perselisihan. Kegagalan budaya yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain adalah akar penyebab kesulitan. Konflik mungkin muncul ketika kelompok budaya yang berbeda gagal untuk berkomunikasi satu sama lain dan berusaha untuk memahami satu sama lain. Keberagaman suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia pada masa perang yang terjadi di sana, seperti Konflik Sampit di Kalimantan Tengah, menjadi pendorong terjadinya konflik-konflik tersebut. Provokator juga dapat menggunakannya sebagai alat untuk menimbulkan masalah di dalam masyarakat jika mereka menginginkannya. Varietas yang sudah ada sebelumnya harus diakui sebagai sesuatu yang alami dan aktual sebagai tindakan pencegahan. Selain itu, manajemen konflik diperlukan sebagai komponen solusi, yang juga mencakup pendidikan multikultural, dengan tujuan mencegah potensi perselisihan sejak dini. Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk meningkatkan tingkat pemahaman, apresiasi, dan komunikasi masyarakat satu sama lain.

b. Pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah

Proses reformasi dan demokrasi di Indonesia telah membawa negara ini berhadapan dengan berbagai persoalan baru yang sulit. Ada hubungan yang dibuat antara salah satunya dan masalah budaya. Dari segi budaya, penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah berpengaruh signifikan terhadap pengakuan budaya dan keragaman lokal. Hal ini sangat kontras dengan kebijakan budaya terpusat yang berlaku pada masa Orde Baru. Alih-alih dikendalikan oleh strategi terpusat, sumber daya negara yang paling berharga budayanya berkembang secara organik dalam kerangka banyak budaya regional. Semuanya, bahkan masalah kedaerahan, boleh digunakan untuk kekuasaan atau untuk mempertahankan kekuasaan jika Anda berada dalam posisi otoritas. Gagasan memiliki "Putra Tanah" memegang jabatan utama dalam pemerintahan tidak dimaksudkan untuk membocorkan ideologi apa pun; sebaliknya, ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kemampuan pemerataan. Pemerintah harus mengikutsertakan "Anak Tanah" agar dapat menginspirasi generasi muda untuk berperan aktif dalam pertumbuhan dan pembangunan daerah. Gagasan keadilan dan kesetaraan dapat dilihat sebagai harapan. Namun, jika masalah ini dibesar-besarkan, masyarakat akan terpecah oleh banyaknya kesulitan daerah. Pertanyaan tentang regionalisme memiliki cara cepat mengobarkan rakyat. Ada kemungkinan motivasi pribadi, seperti kecemburuan dan pengejaran kekuasaan, untuk memanifestasikan dirinya dalam cara yang berbahaya dalam kehidupan publik. Dalam upaya menggalang dukungan masyarakat luas, beberapa individu dan organisasi terus-menerus menghebohkan gagasan pemisahan wilayah menjadi provinsi atau kabupaten, yang telah diusulkan akhir-akhir ini. Mereka berkumpul untuk

memanfaatkan situasi di lokasi ini. Tidak sulit memprovokasi masyarakat, terutama mereka yang tergabung dalam komunitas tertindas atau kurang mampu.

c. Kekurangan nasionalisme

Agar ada keragaman budaya, harus ada kekuatan pendorong (an Integrating Force) yang menyatukan orang. Kekuatan pendorong ini harus dikaitkan dengan keragaman bangsa. Sebagai visi negara, jati diri bangsa, dan falsafah negara, Pancasila merupakan harga yang ditetapkan yang tidak dapat ditawar-tawar dan menjadi faktor pemersatu. Sejak masalah kedaerahan telah diangkat, sekarang ada sedikit perhatian yang diberikan pada Pancasila, dan tidak diberikan tempat yang semestinya. Pancasila sebagai falsafah Orde Baru perlu ditinggalkan karena ruang lingkungannya yang terbatas dan kesalahan persepsi yang melekat.

Pada masa Orde Baru, pembuatan kebijakan dilakukan secara terpusat, dan ketika pemerintahan itu runtuh, individu-individu didesak untuk meninggalkan atau mengubah dasar, termasuk Pancasila. Namun demikian, tidak semua yang masuk dalam Orde Baru itu salah, begitu juga tidak semua yang ada di sana itu tepat. Ada aspek lain yang masih perlu pengembangan lebih lanjut. Nasionalisme harus dipertahankan, tetapi ini harus dilakukan dengan pendekatan pendidikan, persuasif, dan humanistik daripada melalui penggunaan kekuatan. Signifikansi Pancasila sebagai kekuatan pemersatu kedaerahan telah dibuktikan sepanjang sejarah. Ada kebutuhan mendesak dan kritis akan rasa nasionalisme yang kuat di Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan masalah yang berpotensi memecah dan memecah negara.

d. Fanatisme

Fanatisme, dalam arti luasnya, diperlukan, tetapi jenis fanatisme yang

terfokus secara sempit berbahaya karena menggambarkan satu kelompok tertentu sebagai yang paling jujur dan dermawan sementara melihat semua organisasi lain sebagai musuh. Meskipun demikian, masalah fanatisme terbatas mwujud di bangsa ini dalam berbagai cara yang berbeda. Sebagai contoh, Bonek yang merupakan penggemar sepak bola di negeri sendiri, mewakili tanah airnya. Meskipun tim sepak bola lokal berhasil, semangat yang luar biasa untuk klub dan permusuhan irasional yang ditunjukkan terhadap klub saingan membuat dinamika yang berbahaya. Fenomena tersebut ditandai dengan penggunaan kekerasan fisik terhadap pemain lawan serta perusakan kendaraan dan hal-hal lain di dalam dan sekitar stadion.

Fanatisme dan kebanggaan dalam kelompok adalah hal yang sehat dan sangat penting, tetapi ketika mereka memanasifasikan diri dalam perilaku bermusuhan dan kekerasan, fanatisme mengambil kualitas destruktif yang tidak sehat atau esensial. Ilustrasi lain dari fanatisme picik terlihat pada konflik dan ketidaksepakatan yang terjadi di Indonesia antara aparat kepolisian setempat dengan TNI. Apalagi bila fanatisme ini bercampur dengan kesulitan agama (seperti di Ambon, Maluku dan Poso, Sulawesi Tengah), berpotensi menjadi tantangan bagi kohesi nasional negara ini.

e. Konflik Kesatuan Bangsa dan Multikultural

Kekuatan persatuan nasional dan dorongan menuju multikulturalisme terlibat dalam perjuangan yang dapat digambarkan sebagai tarik ulur. Keinginan untuk menjaga persatuan nasional, di satu sisi, dilatarbelakangi oleh kepedulian terhadap kesejahteraan negara secara keseluruhan. Di sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari, gagasan stabilitas nasional dipelintir dan dieksploitasi untuk mencapai tujuan

politik tertentu. Terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh merupakan salah satu contoh yang terjadi ketika strategi menjaga stabilitas nasional diarahkan untuk fokus pada penerapan tekanan dan pengerahan kekuatan militer. Hal ini akan menimbulkan rasa permusuhan terhadap otoritas terpusat, yang tentu saja membahayakan keutuhan negara secara keseluruhan. Untungnya, ada solusi yang tidak menggunakan kekerasan atau sikap tidak hormat yang dapat menyelesaikan argumen ini. Akhirnya ini semua pihak yang bertikai diminta untuk berdamai dan bersama-sama membangun daerah-daerah yang porak poranda akibat pertempuran berkepanjangan serta dampak tsunami.

Ada gerakan untuk memisahkan diri dari otoritas pusat dengan argumen memiliki perbedaan budaya dengan pemerintah pusat di Jawa. Salah satu gerakan tersebut adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Gerakan ini berasal dari sisi multikultural yang menjadi perdebatan. Namun belakangan ini, masalah pemisahan telah berhasil diselesaikan melalui penggunaan solusi damai dan multikultural. Salah satu panglima perang OPM yang menyerah dan berjanji setia kepada NKRI bertanggung jawab untuk mendirikan pemukiman Bhinneka Tunggal Ika di Nabire, yang terletak di Papua.

f. Kesejahteraan ekonomi yang tidak merata antara kelompok budaya yang beragam

Kecemburuan menjadi pendorong terjadinya konflik berbasis SARA, seperti yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan karena penduduk pendatang dipandang memiliki kedudukan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan penduduk lokal. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kesejahteraan ekonomi merupakan

faktor yang berkontribusi dalam munculnya beberapa perselisihan budaya. Orang-orang yang merasakan dampak tekanan ekonomi yang signifikan seringkali menjadi pihak yang terlibat dalam protes yang meluas yang terjadi di negara kita. Ini benar terlepas dari isi peristiwa dan demonstrasi yang terjadi. Bahkan, mereka terbuka kemungkinan menerima pembayaran dua puluh ribu rupiah untuk berpartisipasi dalam protes terlepas dari orientasinya. Kasus seperti ini sudah banyak diberitakan oleh media.

Ketika orang-orang sedang berjuang secara ekonomi, mereka mudah ketakutan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan ideologi anarkis. Mereka akan melampiaskan amarahnya pada kelompok mapan yang mampu menikmati kemakmuran sementara mereka sendiri tidak mampu mendapatkannya. Hal ini diperparah dengan maraknya oknum-oknum yang nekat merusak mobil-mobil mahal, yakni kendaraan mewah. Selama kerusakan, mobil mewah, yang dilihat sebagai simbol kemakmuran dan ketergantungan, biasanya menjadi sasaran kerusakan. Bahkan dalam kehidupan normal mereka, mereka sering dirugikan di beberapa lokasi yang dikuasai oleh orang-orang tertindas.

g. Keberpihakan Media Massa

Tidak diragukan lagi ada satu filosofi yang lazim di media massa yang dijunjung tinggi dan dihormati. Tanggung jawab atas dampak informasi yang disampaikan perlu dipertimbangkan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan otonomi dan independensi pers, serta hak-hak masyarakat umum. Orang-orang perlu waspada terhadap pihak-pihak tertentu yang menggunakan media untuk mencapai tujuan khusus mereka sendiri, yang mungkin sangat berbahaya bagi

budaya Indonesia dan harus dihindari bagaimanapun caranya. Skandal-skandal yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah dan tokoh masyarakat terkemuka, yang telah mendapat liputan luas di media, pasti akan menghasilkan "hukuman" dalam bentuk sanksi hukum dan sosial, yang dapat membantu menumbuhkan budaya baru yang merusak budaya tradisional. Faktanya, berita semacam itu sangat laku dan menarik perhatian masyarakat umum. Namun, ia juga memiliki kemampuan membujuk orang untuk menyerap nilai-nilai buruk yang bertolak belakang dengan budaya Timur.

Kasus perceraian yang melibatkan tokoh populer yang ditampilkan di media juga membawa pandangan publik yang buruk; Akibatnya, persepsi perceraian dan pernikahan kembali menjadi budaya baru dan tren yang meluas. Ada penurunan dalam hal pernikahan sebagai sebuah institusi. Karena menonton televisi dan membaca surat kabar telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di negara kita, media, khususnya televisi, memiliki tanggung jawab untuk memberikan konten yang relevan bagi mereka dan untuk mempromosikan nilai-nilai budaya yang positif kepada pemirsa. Oleh karena itu, kaca mata berfungsi sebagai pemandu selain memberikan arah bagi kaca mata itu sendiri.

Hal ini akan memberikan efek yang berbeda pada pemirsa ketika, pada saat yang sama, media menampilkan preman bertato yang bertindak melawan aparat sipil negara. Ketika pengusuran permukiman liar ditunjukkan dengan tangisan duka warga yang dipadukan dengan tindakan aparat yang menyeret para gelandangan, maka akan berdampak demikian. Ada rasa ironi yang jelas dalam kenyataan bahwa fokus ditempatkan pada bayi yang meratap dan orang tua mereka daripada pada tato di punggung atau

lengan. Acara yang melibatkan evakuasi komunitas ilegal ini menggunakan berbagai simbol. Tindakan menangis sering dianggap sebagai tanda kelemahan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Tato sering dilihat sebagai tanda penjahat dan mereka yang melakukan pemerasan.

Televisi memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi publik dengan menarik perhatian pada berbagai kejadian. Melihat kekurangan dan kekurangan yang ada dalam proses pelaksanaan pendidikan multikultural saat ini, penting kiranya proses pelaksanaan pendidikan karakter ke depan dilakukan dengan cara yang metodis dan diteliti dengan baik. Gagasan utamanya adalah bahwa di masa depan, harus ada penekanan yang lebih besar pada kuantitas dan kualitas pendidikan antarbudaya. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu memiliki kesadaran mendasar bahwa pluralisme adalah investasi yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena populasinya yang beragam, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi dinamis, kreatif, dan inventif. Pendidikan multikultural diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada semua peserta didik tanpa memandang status sosial ekonomi, jenis kelamin, orientasi seksual, latar belakang suku, ras, atau budaya. Hal ini memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di kelas. Pendidikan multikultural harus dibina sedini mungkin. Gagasan bahwa siswa tidak belajar dalam ruang hampa melainkan dipengaruhi untuk belajar dengan cara tertentu oleh budaya mereka adalah landasan lain dari gerakan pendidikan multikultural (Parkay dan Stanford, 2011: 35).

Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia perlu disesuaikan, bukan dilakukan dengan cara yang tidak perlu dari disiplin ilmu yang

berbeda atau secara tunggal. Pelaksanaan pendidikan multikultural didasarkan pada lima dimensi berikut: (1) keterpaduan materi, (2) proses mengkonstruksi pengetahuan, (3) pemberantasan prasangka, dan (4) pedagogi yang sebanding, serta (5) budaya dan struktur sekolah yang memberdayakan sekolah.

Mengenai konsep pluralisme budaya, yang dibutuhkan adalah paradigma baru yang toleran sekaligus halus untuk menghindari dan menyelesaikan perselisihan budaya. Paradigma ini dikenal dengan paradigma pendidikan multikultural. Agar siswa mengembangkan sikap yang menerima keragaman, penting bagi mereka untuk dibimbing melalui proses menghadapi kenyataan hidup dalam masyarakat yang bervariasi. Bukti tak terbantahkan dari meluasnya perselisihan etnis, budaya, ras, dan agama menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita telah gagal untuk berhasil membawa pemahaman tentang pentingnya keragaman. Adapun konstruksi paradigma pendidikan multikultural, berikut adalah beberapa saran Zamroni (2011): Penyediaan pendidikan berkualitas tinggi untuk semua orang membutuhkan, pertama dan terutama, fokus pada pendidikan multikultural. Bukan hanya modifikasi praktik pedagogis atau modifikasi kurikulum yang membawa transformasi kesadaran, yang pada akhirnya menawarkan panduan ke mana praktik pendidikan harus diarahkan. Melalui pengalaman, kami belajar bahwa upaya untuk menipu orang dengan mengabaikan kesenjangan pendidikan menghadirkan ancaman ketidakadilan yang meningkat. Oleh karena itu, pendidik yang menyelenggarakan pendidikan multikultural perlu memiliki keyakinan pada poin-poin berikut: perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai; sekolah harus menjadi contoh ekspresi hak asasi manusia dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dan kelompok; keadilan dan kesetaraan sosial harus menjadi fokus utama dalam kurikulum; sekolah dapat memberikan

pengetahuan, keterampilan, dan karakter (yaitu nilai, sikap, dan komitmen) untuk membantu siswa dari berbagai latar belakang, dengan keluarga sebagai sistem pendukung utama mereka.

Sampai saat ini, pendidikan multikultural baru menjadi topik pembicaraan. Meskipun Indonesia dan Amerika Serikat memiliki keragaman budaya yang sangat besar, implementasi pendidikan multikultural di Indonesia tampaknya tidak memiliki tingkat keberhasilan yang sama seperti di Amerika Serikat. Primordialisme telah menjadi kekuatan pendorong di belakang pendidikan untuk sebagian besar sejarahnya yang panjang.

Akibatnya, pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia dapat menjadi fleksibel dengan tetap menempatkan fokus pada nilai-nilai fundamental yang menopang keragaman. Penting untuk diingat tujuan menyeluruh dari pendidikan multikultural, apa pun bentuk atau modelnya. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut: (1) menumbuhkan pemahaman mendasar tentang proses pembuatan sistem dan memberikan pendidikan pelayan yang setara; (2) mengkaitkan kurikulum dengan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah dalam rangka membangun visi “lingkungan sekolah yang fleksibel”. Menurut Gay (2002), yang dikutip oleh Zamroni (2011: 150), prinsip keluwesan dalam pendidikan multikultural menyatakan bahwa adalah suatu kesalahan untuk melaksanakan pendidikan multikultural dalam bentuk mata pelajaran tertentu atau dengan cara yang seragam. Zamroni (2011: 150) juga menyatakan bahwa prinsip ini disarankan. Sebaliknya, pendidikan multibahasa dan multikultural perlu dilihat sebagai strategi untuk mendorong penelitian yang menyeluruh dan mendalam. Pendidikan tentang berbagai budaya juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan bercirikan semangat kesetaraan dalam segala aspek kehidupan

sosial. Hal ini dapat dicapai ketika setiap warga negara memberikan kontribusi yang sepadan dengan kapasitas mereka dan kesempatan yang diberikan kepada mereka oleh masyarakat secara keseluruhan. Bahkan Gay menganjurkan bahwa hal itu harus memberikan murid kesempatan untuk belajar tentang peran yang dimainkan budaya dalam meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Zamroni (2011) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural diusulkan untuk digunakan sebagai instrumen rekayasa sosial melalui pendidikan formal. Dengan kata lain, lembaga sekolah harus berperan dalam menumbuhkan kesadaran hidup dalam masyarakat multikultural dan mengembangkan sikap toleransi untuk mewujudkan kebutuhan dan kemampuan bekerja sama dengan segala perbedaan yang ada. [Rujukan?] Sekolah harus dilihat sebagai komunitas kecil, dan dengan demikian, mereka harus memasukkan semua komponen yang membentuk masyarakat. Hak siswa dinyatakan dalam kemampuan, minat, dan tujuannya; jika sekolah dianggap sebagai komunitas kecil, ini menunjukkan bahwa siswa dilihat sebagai individu dengan sifat-sifat ini; alternatif, ini menunjukkan bahwa siswa dilihat sebagai sebuah komunitas.

Di sekolah dengan tingkat keragaman yang tinggi, sekolah harus memperhatikan kebutuhan perkembangan siswa, yang meliputi: a) kebutuhan pribadi dan sosial, b) kebutuhan vokasional dan profesional, dan c) kebutuhan perkembangan psikologis dan spiritual dan moral.

Semua hal ini harus dipenuhi di tingkat masyarakat, termasuk persyaratan akademik, persyaratan psikologis serta keinginan untuk memiliki dan rasa aman. Lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sekolah harus menjadi tempat berlindung yang aman dengan rasa kebersamaan dan kemauan untuk saling membantu. Pertumbuhan intelektual, sosial, moral, dan spiritual seseorang merupakan bagian dari

proses pendidikan. Motivasi dan dorongan ekstrinsik siswa harus dilengkapi dengan motivasi dan dorongan internal siswa.

Pendidikan multikultural memiliki dua tujuan untuk berkembangnya peserta didik dilihat dari hasil belajarnya. Identifikasi budaya di sini didefinisikan sebagai kemampuan siswa untuk mengidentifikasi sebagai milik kelompok etnis tertentu. Kebanggaan etnis dan kepercayaan diri dapat dihasilkan melalui pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran seseorang tentang komunitas etnis. Kedua, adanya interaksi dengan orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada sub-bab sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia saat ini ternyata masih memiliki sejumlah kelemahan dan kekurangan, menurut analisis situasi. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami pentingnya varietas tersebut. Dalam bidang pendidikan, ada sekolah-sekolah tertentu yang belum mendorong rasa hormat terhadap keragaman siswanya. Para pendidik, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan terpenting dalam sistem pendidikan, belum menunjukkan kepada siswa bagaimana mereka harus mewujudkan semangat toleransi untuk berkontribusi pada pemantapan Indonesia sebagai satu negara.
2. Penyelesaian masalah dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan pendidikan multikultural sebelumnya harus menjadi penekanan utama pelaksanaan pendidikan multikultural di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan yang terintegrasi baik kuantitas maupun kualitas pendidikan multikultural. Salah satu contohnya

adalah pendirian sekolah-sekolah yang mengasimilasi baik pendatang maupun penduduk asli di daerah-daerah di mana program transmigrasi aktif. Sekolah-sekolah ini juga akan disertai dengan kegiatan asimilasi yang sebenarnya, seperti pertunjukan kolaboratif dalam seni pertunjukan. Untuk menutup kesenjangan apapun, diskriminasi harus diberantas. Misalnya, sekolah berkonsep eksklusif yang dikhususkan hanya untuk etnis, agama, penduduk, atau komunitas tertentu harus dihindari. Sebab, sekolah semacam itu akan membangun hambatan mental yang berpotensi menggerogoti nilai-nilai toleransi dan semangat persatuan. Demikian pula, model pendidikan yang berbasis prasangka harus diberantas dengan mengubahnya menjadi model pendidikan yang adaptif dan menghargai keragaman. Kegiatan yang mencakup diskriminasi atas dasar suku, budaya, agama, bahasa, atau dasar lainnya harus diminimalkan seminimal mungkin karena hal itu akan merusak kesatuan jiwa. Disarankan agar pandangan tentang pribumi terhadap nonpribumi dihilangkan karena dalam jangka panjang akan menimbulkan perbedaan pendapat yang pada akhirnya akan mengakibatkan hancurnya semangat persatuan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi azra. 2005. Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam. Bandung: Nuansa.
- Abdillah, Masykuri. 1993. Demokrasi di Persimpangan Artinya: Muslim Indonesia Respon Intelektual Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993.

- Ainul Yaqin, M. 2005. Pendidikan Multikultural: Pemahaman Lintas Budaya untuk Demokrasi dan Keadilan. Yogyakarta: Pilar Media.
- Anderson dan Cusher. 1994. Studi Multikultural dan Antarbudaya di C. Marsh (ed), Studi Pengajaran Masyarakat dan Lingkungan (Sydney: Prentice-Hall,)
- Azra, Azumardi. 2013. Krisis Identitas dan Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia. Tersedia di: <http://budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azra.htm>.
- Baidhawi, Zakiyuddin. 2005. Pendidikan Agama Multikultural Berwawasan. Jakarta: Erlandia.
- Bank, James. 1984. Strategi Pengajaran Untuk Studi Etnis. Newton: Allyn dan Bacon.
- Blum, Lawrence A. 2001. Anti-rasisme, multikulturalisme, dan Komunitas Antar Ras, Three Value Yang is Educating for A Multicultural Society, dalam Larry May, dan ShariColinsChobanian, Applied Ethics: A Multicultural Approach, Interpretation: Sprott Carolina and Dadang Rusbiantoro . Yogyakarta: Wacana Tiara.
- Baker G.C. 1994. Perencanaan dan Pengorganisasian Pembelajaran Multikultural. (2). California: Perusahaan Penerbitan Addison-Elseley.
- Banks, James A. (ed.). 1989. Pendidikan Multikultural: Isu dan Perspektif. Boston London: Allyn dan Bacon Press.
- Bhiku Parekh. 1996. Konsep Pendidikan Multikultural dalam Sohen Modgil et al (ed) Pendidikan Multikultural Perdebatan yang Tak Ada Habisnya. London: The Falmer Press.
- Dawam, Ainurrofiq. 2003. Sekolah “Tidak Mau”: Menolak “Komersialisasi Pendidikan” dan “Kanibalisme Intelektual” terhadap Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pers Inspeal Ahimsakarya.
- Dardi Hasyim, Yudi Hartono. Pendidikan Multikultural di Sekolah. UPT penerbitan dan percetakan UNS. Surakarta. Atraksi: 28 [4].
- Dardi Hasyim, Yudi Hartono. 2009. Seminar Internasional Pendidikan Multikulturalisme Dan Pendidikan (Bahasa dan Seni). "Bhineka Tunggal Ika". Negara Yogyakarta Universitas 21-22 Oktober 2009.
- Effendi, Johan. 2004. Kemusliman dan Pluralisme Agama, di Elpa Sarapung (Red), Yogyakarta: Pustaka Mahasiswa, cet.III.
- Djohar. 2003. Alternatif Strategis Pendidikan untuk Pendidikan Masa Depan, Yogyakarta: LESFI.
- Farida Hanum. 2005. Fenomena Pendidikan Multikural pada Aktivis Mahasiswa UNY. Laporan penelitian. Lemlit UNY.
- Gollnick, M.Donna, dan Philip C. Chinn. 1998. Pendidikan Multikultural dalam Masyarakat yang Pluralistik. New Jersey: Prentice Hall.
- Imron, Mashadi. 2009. Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Multikulturalisme. Pusat Penelitian Agama. Jakarta. Atraksi: 48 [3]
- Hasyim Djalal. 2007. Identitas Nasional dalam Ancaman Globalisasi, Pokok Pemikiran Guru Besar

- Indonesia. Surabaya: Pers Universitas Airlangga.
- Hernandez, Hilda. 2002. Pendidikan Multikultural: Panduan Guru untuk Menghubungkan Konteks, Proses, dan Isi. New Jersey dan Ohio: Prentice Hall.
- Musa Asy'ari. 2004. Pendidikan dan Konflik Multikultural 1-2. www.kompas.co.id. Akses Juli 2005.
- Maksum, Ali dan Luluk Yunan Ruhendi. 2004. Paradigma di Era Modern Pendidikan Universal dan Post-Modernisme. Yogyakarta: IRCiSod.
- Maslikhah. 2007. Pendidikan Multikultural Quo Vadis: Nasional Berbasis Rekonstruksi Sistem Pendidikan. Surabaya: JP Books.
- Mahfud, Choirul. 2008. Pendidikan Multikultura, Yogyakarta: Perpustakaan Siswa.
- M.Ainul Yaqin. 2005. Pendidikan multikultural: pemahaman lintas budaya untuk demokrasi dan keadilan. Yogyakarta: Pilar Media.
- Suparlan, Parsudi. 2002. "Menuju Indonesia yang Multikultural". Makalah dipresentasikan pada Simposium Internasional 3 Bali, jurnal Indonesia Antropologi, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.
- Suparta, Mundzier. 2008, Pendidikan Islam Multikultural: Refleksi Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Al Ghazali Center.
- Sutarno. 2007. Pendidikan Multikultural. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan.
- Sleeter dan G. Burnett. 1994. Varietas Pendidikan Multikultural: Sebuah Pengantar, Eric Clearinghouse tentang Pendidikan Perkotaan, Intisari.
- Thohir, Mudjahirin. "Nasionalisme Indonesia: Membingkai Pluralitas Damai", dalam Zudi Setiawan, Nasionalisme NU, Semarang: Seni, Sains.
- Tilaar, H.A.R. 2002. Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Sipil di Indonesia. Jakarta: Pemuda Rosdakarya.
- Zamroni. 2010a. Pelaksanaan pendidikan multikultural. Seorang pembaca. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.